

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rasyid, Roihan, 2002, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Dja'is, Mochammad & Koosmargono, RMJ., 2010, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, Semarang: Oetama.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke Delapan*, Yogyakarta:LIBERTY.
- Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta:Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung:PT Alumni.
- Soerjowinoto, Petrus, Et.al, 2014. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang:Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar. 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:Alumni.
- Syahrani, Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tresna, R, 2000, *Komentar HIR*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Utsman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

C. Sumber Online

<http://www.pa-kotamadiun.go.id>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2017).

<http://alumni.unair.ac.id> , (diakses pada tanggal 18 Desember 2017).

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> , (diakses pada tanggal 31 Januari 2018).

<http://www.proseshukum.com> , (diakses pada tanggal 28 Mei 2018).

<http://pn-semarangkota.go.id> , (diakses pada tanggal 30 Mei 2018).

<http://pa-semarang.go.id> , (diakses pada tanggal 30 Mei 2018).

<http://www.pn-ungaran.go.id> , (diakses pada tanggal 9 April 2018).

<http://pa-demak.go.id> , (diakses pada tanggal 9 April 2018)

D. Lain-lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Masalah Hukum Arbitrase Online*. Buku No.9.
Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kode Etik Hakim.

